



P-ISSN 2746-5241

JAM: Jurnal Abdi Masyarakat Vol 4., No 1,
Mei 2023, Hal 65-69

Email: lppm@wdh.ac.id Website :
lppm.wdh.ac.id

GOOD GOVERNANCE

Riris Andriati

STIKes Widya Dharma Husada Tangerang, Jalan Pajajaran No.1, Kota Tangerang Selatan, 15417, Indonesia

Email: ririsandriati@wdh.ac.id

ABSTRACT

Education is a deliberate and planned effort to create a learning environment and learning process in which students actively develop their potential to have religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and skills required by themselves, society, nation, and country. Higher education is the level of education that follows secondary school. Higher education's goals are to develop students' potential, master science and/or technology, produce science and/or technology through research, and realize community service. To realize a good education system, every component of an educational institution must collaborate to create a good leadership system. A good government system is required to realize a good education system, so the author conducts socialization about a good governance system. This activity has increased public awareness of good governance systems.

Keywords : *Education, Government, Good Governance*

PEMERINTAHAN YANG BAIK

ABSTRAK

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Tinggi adalah Jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah. Tujuan Pendidikan Tinggi adalah : mengembangkan potensi mahasiswa, menguasai ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penelitian, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Demi mewujudkan sistem Pendidikan yang baik, maka setiap elemen dari suatu institusi Pendidikan harus bekerjasama membangun sistem kepemimpinan yang baik. Untuk mewujudkan sistem Pendidikan yang baik, maka perlu sistem pemerintahan yang baik, maka dengan ini penulis melakukan sosialisasi tentang sistem pemerintahan yang baik. Hasil kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Pendidikan, Pemerintahan, Pemerintahan yang baik

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan Tinggi adalah Jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah.

Tujuan Pendidikan Tinggi adalah: mengembangkan potensi mahasiswa, menguasai ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dihasilkannya ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penelitian, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat. Proses pencapaian tujuan Pendidikan tinggi yaitu : dosen dan tenaga kependidikan sistem penunjang berkualitas, semua unit kerja berkualitas, dilaksanakan secara konsisten dan progresif, perguruan tinggi yang berkualitas, dan tercapainya tujuan Pendidikan tinggi. Dalam pengelolaannya, perguruan

tinggi memiliki 3 komponen penting, yaitu: Dosen dan tenaga kependidikan, pengelola perguruan tinggi (Ketua, wakil, dan para ka prodi), serta sistem perguruan tinggi.

Oleh karena itu perlunya dilakukan sosialisasi sistem pemerintahan yang baik agar menambah pengetahuan peserta terkait cara menumbuhkan sistem pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan ini, dilakukan sosialisasi tentang sistem kepemimpinan yang baik dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pertama

Persiapan sosialisasi termasuk pembuatan naskah presentasi dan penyusunan jadwal pemberian materi.

2. Tahap Kedua

Penulis menyebarkan undangan melalui whatsapp. Tujuannya untuk mengetahui kegiatan sosialisasi, maka semua kegiatan pastinya akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Tahap Ketiga

Tim mengadakan presentasi terkait dengan materi yaitu *Good Governance* melalui media powerpoint dan *zoom meeting*.

4. Tahap Keempat

Tim mengadakan evaluasi dengan diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan tinggi tidak hanya berfokus sebagai pusatnya pengetahuan, pusatnya penelitian dan pengabdian masyarakat, namun juga berfokus pada kemampuan mereka dalam bersaing dan upaya menjaga *going concern* nya. Pada perusahaan yang berorientasi pada profit hal-hal yang menjadi tuntutan adalah aspek harga, produk dan layanan. Tidak berbeda dengan organisasi profit, pada organisasi non profit seperti perguruan tinggi hal ini juga perlu diperhatikan (Putra et al, 2021).

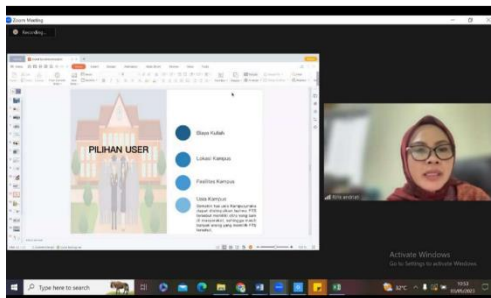
Tata kelola yang diperlukan dalam perguruan tinggi mencakup bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keuangan. *Good university* itu

sendiri bukanlah konsep yang baku, hal ini berarti walaupun prinsipnya sama namun penerapannya dapat dilakukan dengan berbeda berbeda tergantung dari kondisi dan paham yang dianut (Putra et al, 2021).

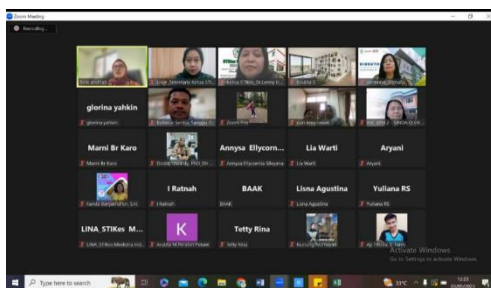
Komponen penting dalam pengelolaan perguruan tinggi diantaranya adalah : Dosen dan tenaga kependidikan dosen dan tenaga kependidikan sistem penunjang berkualitas, semua unit kerja berkualitas, dilaksanakan secara konsisten dan progresif, perguruan tinggi yang berkualitas, dan tercapainya tujuan Pendidikan tinggi. Seorang Dosen harus memiliki kualifikasi Pendidikan minimal S2 dan atau S3, bersedia merintis jenjang karir dan memiliki sertifikasi dosen, serta selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui seminar/workshop untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Tenaga kependidikan juga harus sesuai kualifikasi, mau merintis karir, dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensi.

Kampus harus memiliki sistem yang kuat, mudah di akses, dan minim error. Penjaminan mutu dan relevansi

tercermin dari adanya akreditasi program studi, sertifikasi profesi dosen, tracer study alumni dan pengguna serta menerima feedback dari mahasiswa. Efektifitas dan efisiensi dengan melakukan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah (renstra) dan perencanaan tahunan (RKAT) (Putra et al, 2021). Selain itu kampus juga harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat agar minat masyarakat terhadap kampus tersebut semakin meningkat.



Gambar 1. Narasumber Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Sasaran Peserta Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perguruan tinggi, menyebabkan kampus berlomba – lomba untuk menjadi kampus terpilih, oleh karena itu sistem pengelolaan yang baik wajib dilaksanakan untuk meningkatkan mutu kampus.

Saran

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peserta terkait *good governance* dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, Abdul Qodri. 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta:Gramedia. Barata.
- Atep. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Gramedia.
2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press. - -----, 2003. *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang harus dilakukan? Policy Brief*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Dwiyanto, Agus, dkk., 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: UGM Press. IAN & BPKP. 2000. Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang.

Putra, AIP., Roni, M. 2021. Good Governance dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance). Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam. 11(2):22-6-236.

Sadjiono. 2007. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LAKSBANG.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No.23/MPM/BUMN/2000 tentang: Pengembangan Praktik Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO).